



KELEMBAGAAN WILAYAH PENGEMBANGAN DI JAWA TENGAH **Studi Kasus Wilayah Kedungsepur**

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT AREAS IN CENTRAL JAVA *Case Study of the Kedungsepur Region*

**Holi Bina Wijaya¹, M. Indra Hadi Wijaya¹, Kanindya Nooringsih¹,
Arif Sofianto², Tri Risandewi², Setyo Aji Wijayanto², Tri Susilowati², Novan Setiawan²**

¹Perencanaan Wilayah dan Kota, UNDIP Semarang

²Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Korespondensi: brida@jatengprov.go.id

Abstrak

Wilayah Pengembangan (WP) Kedungsepur merupakan kawasan strategis Jawa Tengah dengan Kota Semarang sebagai simpul utama logistik dan jasa. Permasalahan utamanya adalah belum terbentuk kelembagaan yang kuat yang mampu mengkoordinasikan perencanaan lintas wilayah, memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah, serta mengintegrasikan pembangunan sektor unggulan dalam kerangka rantai pasok ekonomi yang menyeluruh. Kelembagaan eksisting berbentuk Sekretariat Bersama yang bersifat pasif dan simbolis. Proses koordinasi antar daerah berjalan informal, dan tidak ada mekanisme pembiayaan bersama. Akibatnya, potensi Kawasan antara lain industri, pertanian, dan pariwisata tidak terintegrasi menjadi kekuatan kolektif. Hasil analisis menegaskan bahwa meskipun manfaat kolaborasi diakui tinggi, ketiadaan lembaga formal yang aktif, inklusif, dan profesional membuat kerja sama kawasan tidak berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat direkomendasikan langkah strategis pembentukan kelembagaan WP Kedungsepur secara berkelanjutan yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Program jangka pendek (2026–2027) dilakukan dengan penguatan Sekretariat Bersama meliputi: penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kabupaten/kota di dalam WP Kedungsepur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penetapan Bappeda Provinsi sebagai *leading sector* kerja sama antarwilayah, serta merumuskan fokus program quick wins. Program jangka menengah (2028–2030) dengan Pembentukan Satuan Pelayanan Wilayah Pengembangan (SPWP), dengan capaian berupa pelaksanaan proyek quick wins yang dirancang berdasarkan tema strategis kawasan, seperti peningkatan investasi berbasis rantai pasok dan integrasi transportasi regional, serta penerapan mekanisme koordinasi dan perencanaan terpadu. Program jangka panjang (>2030) yaitu penguatan kemandirian SPWP melalui desentralisasi kewenangan dan memperluas tema pengembangan yang dikelola (seperti inovasi ekonomi kawasan, lingkungan, dan layanan publik lintas daerah) serta mereplikasi model kelembagaan SPWP di wilayah pengembangan lain di Jawa Tengah.

Kata Kunci: Jawa Tengah, Kedungsepur, Kelembagaan, Wilayah Pengembangan

Abstract

The Kedungsepur Development Area (WP Kedungsepur) is a strategic region in Central Java, with Semarang City as the main hub for logistics and services. The main problem is the lack of a strong institution capable of coordinating cross-regional planning, strengthening collaboration between local governments, and integrating the development of leading sectors within a comprehensive economic supply chain framework. The existing institution is a Joint Secretariat, which is passive and symbolic. The inter-regional coordination process is informal, and there is no

joint financing mechanism. As a result, the region's potential, including industry, agriculture, and tourism, is not integrated into a collective force. The analysis confirms that although the benefits of collaboration are recognized as significant, the absence of an active, inclusive, and professional formal institution makes regional cooperation unsustainable. Based on these findings, strategic steps can be recommended to establish a sustainable Kedungsepur WP institution consisting of short-term, medium-term, and long-term. The short-term program (2026–2027) will be implemented by strengthening the Joint Secretariat, including the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between regencies/cities within Regency in the Kedungsepur and the Central Java Provincial Government, establishing the Provincial Development Planning Agency (Bappeda) as the leading sector for inter-regional cooperation, and formulating the focus of quick-win programs. The medium-term program (2028–2030) will involve the establishment of a Regional Development Service Unit (SPWP), with the objectives of implementing quick-win projects designed based on regional strategic themes, such as increasing supply chain-based investment and regional transportation integration, as well as implementing integrated coordination and planning mechanisms. The long-term program (>2030) will strengthen the independence of the SPWP through decentralization of authority and expanding the development themes managed (such as regional economic innovation, the environment, and cross-regional public services), as well as replicating the SPWP institutional model in other development areas in Central Java.

Keywords: Central Java, Kedungsepur, Institution, Development Area

PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Wilayah Pengembangan (WP) melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan sebagai sebagai salah satu terobosan kebijakan strategis dalam rangka memperkuat integrasi rantai pasok produksi antar wilayah, mendorong efisiensi skala ekonomi, serta meningkatkan daya saing regional.

Masing-masing WP memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. WP Kedungsepur, yang meliputi wilayah Kendal (Kabupaten Kendal), Demak (Kabupaten Demak), Ungaran (Kabupaten Semarang), Semarang (Kota Semarang), Salatiga (Kota Salatiga), dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan), merupakan salah satu WP strategis. Dominasi aktivitas ekonomi yang masih terpusat di Kota Semarang, sementara wilayah penyangga seperti Kendal, Demak, dan Grobogan belum berkontribusi secara optimal terhadap sistem ekonomi kawasan.

Namun demikian, belum tersedianya kelembagaan yang memadai dan terbatasnya koordinasi lintas wilayah menjadi kendala utama dalam optimalisasi peran dan fungsi WP secara holistik. Dalam rangka mendorong pemanfaatan potensi WP Kedungsepur secara terintegrasi, diperlukan suatu kelembagaan yang mampu mengkoordinasikan perencanaan lintas wilayah,

memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah, serta mengintegrasikan pembangunan sektor unggulan dalam kerangka rantai pasok ekonomi yang menyeluruh.

Hal ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan sektor logistik, pariwisata, jasa, dan manufaktur di Jawa Tengah. Kelembagaan WP yang bersifat lintas daerah menjadi instrumen penting dalam mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing wilayah, serta memperkuat kontribusi Jawa Tengah terhadap pembangunan nasional.

Hasil identifikasi BRIDA Provinsi Jawa Tengah (2024) merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan WP melalui tiga strategi utama, yakni: (1) pembentukan Badan Pengelola Wilayah Pengembangan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi dalam fungsi koordinatif lintas daerah; (2) pemberian insentif fiskal dan penyederhanaan regulasi untuk mendukung investasi dan integrasi rantai pasok; serta (3) pengarusutamaan program pembangunan WP ke dalam Masterplan Pembangunan Daerah agar pengembangan sektor unggulan dapat berlangsung secara sinergis di semua tingkatan pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, perlu dipertajam terkait bentuk kelembagaan WP



Kedungsepur. Hal ini relevan seiring dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang telah menguraikan arah pembangunan hingga tingkat program, namun belum menetapkan struktur kelembagaan yang jelas sebagai penanggung jawab pengelolaan WP. Selain itu, berbagai bentuk kerja sama antardaerah yang pernah diupayakan sebelumnya belum mampu mawadahi kebutuhan koordinasi dan integrasi secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya analisis data dan informasi serta menggali berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kelembagaan WP Kedungsepur. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam merumuskan model kelembagaan yang tepat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan koordinasi dan integrasi pembangunan lintas wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Wilayah

Di dalam WP Kedungsepur terdapat Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terkonsentrasi di kawasan perkotaan Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi. Kawasan ini berfungsi sebagai simpul strategis dalam mendukung aktivitas ekspor-impor, pusat kegiatan industri dan jasa berskala nasional maupun antar provinsi, serta sebagai pusat jaringan transportasi utama yang menghubungkan wilayah dalam skala nasional dan regional. Sementara itu, Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) yang difungsikan untuk mendukung aktivitas pada level kabupaten, tersebar di beberapa lokasi strategis. PKL Kabupaten Kendal meliputi kawasan perkotaan Kecamatan Kendal, Weleri, Kaliwungu, Boja, dan Sukorejo. PKL Kabupaten Semarang meliputi kawasan perkotaan Ungaran dan Ambarawa. PKL Kabupaten Demak meliputi kawasan perkotaan Demak dan Mranggen, sedangkan di PKL Kabupaten Grobogan meliputi kawasan perkotaan Purwodadi, Gubug, dan Godong.

Keterkaitan sistem aktivitas WP Kedungsepur mencerminkan bagaimana wilayah ini berkembang sebagai pusat pertumbuhan di Jawa Tengah. Melalui pemetaan peran strategis serta interaksi antardaerah, dapat terlihat pola hubungan fungsional yang menguatkan posisi Kedungsepur sebagai kawasan yang saling terintegrasi.

Pada tahun 2024, dari total PDRB Jawa Tengah sebesar Rp 1.817 triliun, Kota Semarang memberikan kontribusi terbesar, yaitu 14,72%, sekaligus mencatat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,62%. Kabupaten Semarang menyumbang 3,61% dengan pertumbuhan 4,73%, diikuti Kabupaten Kendal 3,24% (pertumbuhan 5,42%), Kabupaten Grobogan 2,06% (pertumbuhan 5,41%), Kabupaten Demak 1,95% (pertumbuhan 5,06%), dan Kota Salatiga 1,04% (pertumbuhan 5,37%).

Tabel 1. Kontribusi PDRB Jawa Tengah dan Pertumbuhan Ekonomi WP Kedungsepur Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Kontribusi PDRB	Pertumbuhan Ekonomi
Kota Semarang	14,72%	5,62%
Semarang	3,61%	4,73%
Kendal	3,24%	5,42%
Grobogan	2,06%	5,41%
Demak	1,95%	5,06%
Kota Salatiga	1,04%	5,37%

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Meskipun kontribusi PDRB wilayah-wilayah pengelolanya masih relatif kecil, pertumbuhan ekonominya tergolong kompetitif dengan sebagian besar berada di atas angka 5%. Ditinjau dari sektor unggulannya, struktur ekonomi WP Kedungsepur tahun 2024 didominasi industri pengolahan. Kabupaten Kendal menjadi yang tertinggi dengan kontribusi 41,70%, disusul Kabupaten Semarang (38,71%), Kota Salatiga (33,14%), dan Kabupaten Demak (31,66%). Kota Semarang memiliki struktur lebih seimbang, dengan industri pengolahan (28,35%) dan perdagangan-jasa (29,71%) yang sama-sama kuat. Kabupaten Grobogan masih ditopang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 26,63% yang mencerminkan basis agraris.

Arah Pengembangan Wilayah

Arahan pengembangan WP Kedungsepur dimuat dalam RTRW Jawa Tengah 2024–2044, sejalan dengan ketentuan dalam Perpres No. 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur, dan RPJMD Jawa Tengah 2025–2029, menekankan peran wilayah sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, pusat industri dan jasa, serta pintu perdagangan internasional. Kedungsepur diarahkan tidak hanya sebagai motor

penggerak ekonomi Jawa Tengah, juga sebagai kawasan strategis nasional yang mengintegrasikan fungsi metropolitan, maritim, dan logistik dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketahanan wilayah pesisir.

Berdasarkan Perpres No. 60 Tahun 2022, arah pengembangan WP Kedungsepur difokuskan untuk mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional. Pembangunan wilayah ini ditopang oleh perdagangan barang dan jasa, industri, maritim, pemanfaatan sumber daya kelautan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, pengembangan tersebut tetap memperhatikan kelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kebijakan penataan ruang WP Kedungsepur meliputi:

1. Pengembangan sistem perkotaan yang hierarkis dan terintegrasi antara Kota Inti dan kota-kota sekitarnya.
2. Penguatan pusat pertumbuhan kelautan dan keterpaduan pemanfaatan ruang untuk memperkuat konektivitas antar kawasan.
3. Pengembangan ekonomi berskala nasional dan internasional yang menekankan peran sektor industri, maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
4. Peningkatan infrastruktur dan sarana perkotaan di bidang transportasi, energi, telekomunikasi, air, dan prasarana dasar lain untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat.
5. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan, melalui peningkatan kawasan lindung, RTH, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, serta pencegahan bencana.
6. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar daerah melalui kemitraan multi pihak dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kawasan.

Arahan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam RTRW Jawa Tengah 2024–2044, yang menekankan penguatan peran Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan, integrasi sektor industri dan logistik, pengelolaan wilayah pesisir, serta peningkatan kerjasama antar daerah. Arah pengembangan Wilayah Pengembangan (WP) Kedungsepur sebagaimana tertuang dalam RTRW Jawa Tengah 2024–2044 difokuskan pada Kedungsepur yang dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang terintegrasi,

berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan lingkungan maupun kebutuhan pembangunan di masa mendatang melalui penguatan peran Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan wilayah, pengembangan sektor industri dan logistik, serta peningkatan kerjasama antar daerah. Selain itu, pengendalian lingkungan pesisir dan alih fungsi lahan menjadi perhatian penting agar pembangunan tetap berkelanjutan. Arah pengembangan WP Kedungsepur meliputi:

1. Penguatan peran Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi dan pusat ekonomi yang mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya.
2. Pengembangan sektor industri dan logistik, termasuk integrasi Pelabuhan Tanjung Emas, pelabuhan darat (*dry port*), pelabuhan umum, serta pelabuhan perikanan.
3. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam pengembangan ekonomi, permukiman perbatasan, infrastruktur dasar, pariwisata, dan penanganan bencana serta kawasan terdampak rob.
4. Pengendalian dan keberlanjutan lingkungan, melalui pengendalian alih fungsi lahan sawah, pemanfaatan wilayah pesisir, serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan memperhatikan kelestarian alam.
5. Optimalisasi pengelolaan KSN Kedungsepur sebagai kawasan strategis nasional yang berperan dalam mendukung daya saing wilayah.

Dalam RTRW, pengembangan kawasan industri difokuskan di Semarang, Kendal, dan Demak dengan prinsip keberlanjutan serta pengendalian alih fungsi lahan sawah untuk mencegah urban sprawl. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan *dry port* secara terpadu diarahkan sebagai pintu ekspor-impor Jawa Tengah, didukung pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani dengan konsep *aerocity* untuk menekan biaya logistik. Selain itu, pendekatan FEW (Food, Energy, Water) Nexus menjadi strategi penting dalam menjaga ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus memperkuat daya saing kawasan.

Selanjutnya, arah tersebut dipertegas dalam Rancangan RPJMD Jawa Tengah 2025–2029 yang memberikan fokus pada implementasi program



konkret, seperti pengembangan kawasan industri, metropolitan, pariwisata, pertanian, hingga infrastruktur kewilayahan. Berdasarkan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dalam rangka mewujudkan WP Kedungsepur sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru Jawa Tengah, arah pengembangan difokuskan pada penguatan industri, metropolitan, pariwisata, pertanian, serta pengelolaan kewilayahan yang berkelanjutan untuk memperkuat daya saing kawasan, meningkatkan konektivitas, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui integrasi sektor industri, pariwisata, pertanian, dan infrastruktur. Upaya ini dilakukan secara lintas kewenangan melalui sinergi antar daerah, dunia usaha, dan pemerintah pusat. Arah kebijakan utama yang akan didorong antara lain:

1. Pengembangan Kawasan Industri Kendal – Demak – Semarang
2. Meningkatkan investasi, memperkuat *link and match* pendidikan vokasi dengan industri, pengembangan pelabuhan dan tol strategis, serta integrasi moda transportasi untuk mendukung kawasan industri dan logistik.
3. Pengembangan Metropolitan Semarang sebagai *Global City*
4. Memantapkan kelembagaan metropolitan, mengoptimalkan Bandara Ahmad Yani, mendukung pembangunan HSR Jakarta–Surabaya, pengembangan TOD, ekosistem *smart city*, dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
5. Pengembangan *Cultural Heritage Tourism*
6. Peningkatan aksesibilitas destinasi wisata (Kota Lama, Gedongsongo, Rawa Pening), promosi wisata sejarah, religi, dan budaya, serta pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
7. Penguatan Produksi dan Hilirisasi Pertanian
8. Peningkatan produksi padi, jagung, bawang merah, perikanan dan garam, pengembangan irigasi dan embung, serta hilirisasi berbasis inovasi, branding produk lokal, hingga dukungan UMKM pertanian-perikanan.
9. Program Sosial, Ekonomi, dan Infrastruktur Kewilayahan
10. Penyediaan hunian layak untuk MBR, Gen Z, dan milenial; revitalisasi pendidikan vokasional; pembangunan SPAM regional,

bandungan, dan tanggul pesisir; pengembangan kawasan konservasi (Gunung Ungaran, mangrove, biosfer Merapi-Merbabu-Menoreh); serta pembangunan infrastruktur energi (pipa gas dan PLTP Ungaran).

Kondisi Kelembagaan WP Kedungsepur

Kelembagaan yang secara formal menaungi kerjasama antar daerah di WP Kedungsepur hingga saat ini hanya terwadahi melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Kedungsepur. Namun, berdasarkan pandangan pemerintah kabupaten/kota dalam WP Kedungsepur, peran Sekber dinilai belum aktif dan cenderung pasif dalam mengkoordinasikan program lintas daerah. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya integrasi perencanaan dan keterbatasan efektivitas koordinasi lintas sektor maupun lintas wilayah, sehingga potensi pengembangan kawasan belum dapat dimaksimalkan secara optimal.

Meskipun demikian, kerjasama antar daerah tetap berlangsung melalui berbagai inisiatif, terutama dalam penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan interaksi ekonomi kawasan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kelembagaan bersama agar sinergi antar kabupaten/kota di Kedungsepur dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi pengembangan wilayah. Beberapa kerja sama strategis yang pernah terjadi di wilayah Kedungsepur antara lain sebagai berikut:

1. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Masyarakat
Mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan, program pembangunan, dan kegiatan masyarakat di wilayah Kedungsepur. Kesepakatan ini menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi lintas daerah dalam mewujudkan tata kelola yang lebih efektif.
2. Perjanjian Kerjasama tentang Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Kedungsepur
Mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya pariwisata serta kebudayaan secara efektif dan efisien. Melalui kerja sama ini, daerah-daerah di Kedungsepur berupaya meningkatkan daya tarik wisata, memperluas pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta

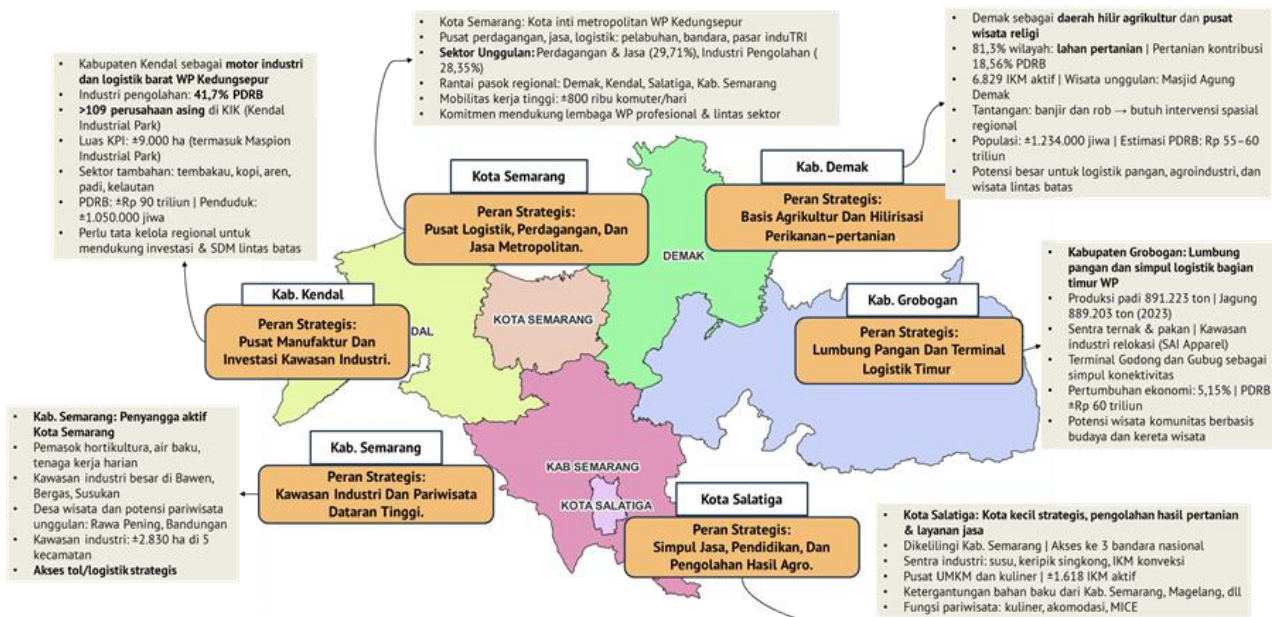
menjaga kelestarian alam, lingkungan, dan budaya.

3. Perjanjian Kerjasama tentang Penanggulangan Bencana se-Wilayah Kedungsepur Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam membangun

ketangguhan wilayah terhadap berbagai ancaman bencana.

Analisis Profil dan Peran WP Kedungsepur

Secara garis besar, peran strategis masing-masing Kabupaten/Kota di WP Kedungsepur ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Peran Strategis Kab/Kota WP Kedungsepur
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kota Semarang berperan sebagai pusat inti metropolitan yang menggerakkan perdagangan, jasa, logistik, dan industri pengolahan. Dengan dukungan pelabuhan, bandara, serta pasar industri, Kota Semarang menjadi simpul utama rantai pasok regional. Mobilitas komuter yang mencapai ±800 ribu orang per hari mempertegas perannya sebagai pusat logistik dan jasa metropolitan.

Kabupaten Kendal menempati posisi sebagai motor industri dan logistik di bagian barat WP Kedungsepur. Basis ekonominya kuat pada sektor industri pengolahan dengan kontribusi 41,7% terhadap PDRB, didukung lebih dari 109 perusahaan asing di Kendal Industrial Park (KIK). Selain itu, Kendal memiliki kawasan peruntukan industri ±9.000 hektar dan potensi tambahan dari komoditas tembakau, kopi, aren, padi, hingga kelautan. Hal ini menjadikan Kendal sebagai pusat manufaktur sekaligus kawasan investasi industri yang membutuhkan tata kelola terintegrasi.

Kabupaten Semarang berfungsi sebagai daerah penyangga aktif Kota Semarang. Kabupaten

ini memasok hortikultura, air baku, serta tenaga kerja harian ke pusat metropolitan. Di sisi lain, wilayahnya memiliki kawasan industri besar seperti di Bawen, Bergas, dan Susukan dengan luas mencapai ±2.830 hektar. Potensi pariwisata unggulan di Rawa Pening dan Bandungan juga memperkuat peran Kabupaten Semarang sebagai simpul industri sekaligus destinasi wisata yang didukung oleh akses tol dan logistik strategis.

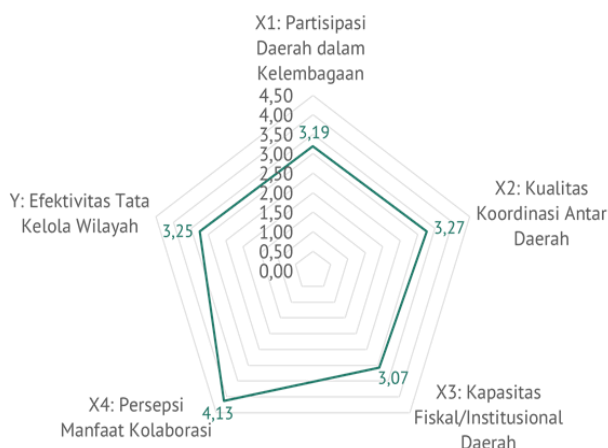
Kabupaten Demak memainkan peran sebagai basis agrikultur sekaligus pusat wisata religi. Dengan 81,3% lahannya berupa pertanian, sektor ini menyumbang 18,56% terhadap PDRB, didukung 6.829 IKM yang bergerak di sektor pengolahan. Masjid Agung Demak sebagai destinasi utama wisata religi memperkuat daya tarik pariwisata daerah ini. Namun, Demak juga menghadapi tantangan berupa banjir dan rob, sehingga membutuhkan intervensi spasial lintas wilayah. Potensi Demak terletak pada logistik pangan, agroindustri, dan wisata lintas batas.



Kabupaten Grobogan berperan sebagai lumbung pangan dan simpul logistik di bagian timur WP Kedungsepur. Dengan produksi padi mencapai 891.223 ton dan jagung 889.203 ton pada tahun 2023, Grobogan menjadi basis ketahanan pangan provinsi. Selain itu, sentra ternak, pakan, dan kawasan industri memperkuat fungsinya sebagai simpul konektivitas.

Analisis Profil Kelembagaan WP Kedungsepur

Hasil kuesioner kuantitatif menunjukkan bahwa persepsi kelembagaan Wilayah Kedungsepur masih bersifat moderat dengan beberapa aspek yang menonjol serta kelemahan yang perlu segera ditangani. Rata-rata skor jawaban per indikator berada pada rentang 2,9 hingga 4,2, yang mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi dan persepsi manfaat kelembagaan berada pada kategori sedang hingga baik. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa Kedungsepur memiliki potensi kelembagaan yang besar dari sisi manfaat kolaborasi, tetapi lemah pada sisi kelembagaan formal, kapasitas fiskal, dan keberlanjutan struktur operasi.



Gambar 2. Skor Agregat Profil Kelembagaan WP Kedungsepur
Sumber: Analisis, 2025

Penguatan kelembagaan WP Kedungsepur tidak dapat dilakukan secara parsial. Partisipasi aktif daerah menjadi titik kunci yang berimplikasi langsung pada efektivitas koordinasi, keberlanjutan kerja sama, serta persepsi positif terhadap manfaat kolaborasi lintas daerah. Dengan demikian, untuk meningkatkan daya saing dan efektivitas tata kelola WP Kedungsepur, perlu dibangun mekanisme yang mendorong partisipasi aktif, memperkuat koordinasi formal lintas sektor,

serta menumbuhkan kepercayaan antar daerah melalui program bersama yang terukur.

Analisis Konsep Kelembagaan

Kondisi eksisting kelembagaan Wilayah Perkotaan (WP) Kedungsepur saat ini masih menghadapi sejumlah keterbatasan mendasar. Hingga kini, belum terbentuk kelembagaan formal dan permanen yang memiliki kewenangan serta anggaran jelas. Kelembagaan yang ada cenderung bersifat berpindah-pindah dan sporadis, hanya muncul atas inisiatif lokal atau sektoral, tanpa integrasi lintas sektor dan wilayah. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya serta pendanaan, sehingga peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong integrasi regional masih sebatas fasilitasi koordinasi, belum mampu menjangkau pada level implementasi yang kuat.

Sejalan dengan itu, muncul harapan agar kelembagaan WP Kedungsepur dapat dibentuk secara aktif, strategis, dan tidak hanya bersifat simbolik. Kelembagaan ini diharapkan memiliki fungsi nyata dan *roadmap* program yang jelas, sehingga mampu menjadi wadah koordinasi sekaligus motor penggerak pembangunan lintas daerah. Bentuk kelembagaan yang diusulkan stakeholder mencakup Sekretariat Bersama permanen (dibiayai provinsi), Forum Koordinasi sektoral tematik, hingga Badan Pengelola Regional yang independen dengan model kelembagaan mirip BP Rebana atau Cekungan Bandung. Adapun ciri kelembagaan yang diinginkan adalah profesional, lintas sektor, serta tidak didominasi oleh satu daerah saja.

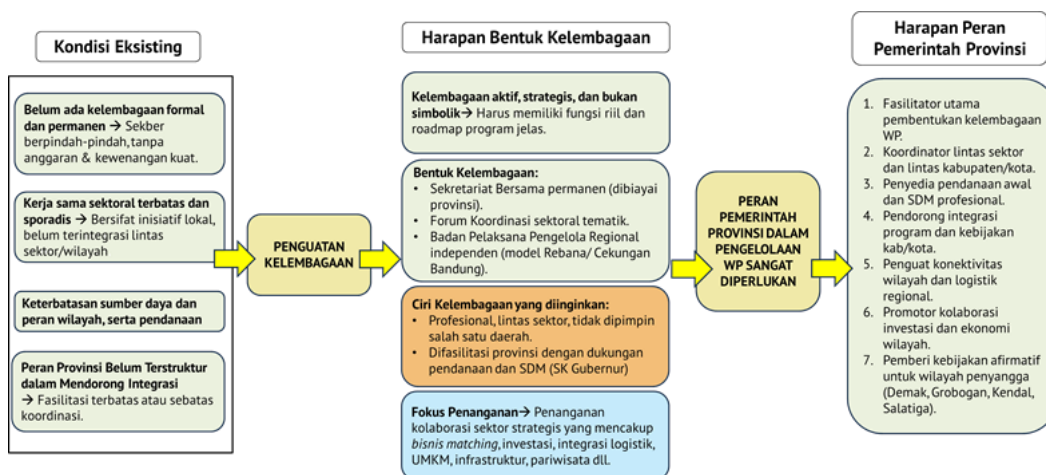
Peran Pemerintah Provinsi di sini menjadi sangat penting, terutama sebagai fasilitator pendanaan dan penyedia sumber daya manusia profesional yang berkelanjutan. Dengan demikian, kelembagaan ini dapat fokus menangani isu-isu strategis, seperti kolaborasi lintas sektor, business matching, investasi, integrasi logistik dan UMKM, infrastruktur, serta pariwisata regional.

Konsep kelembagaan dapat mengacu pada model *The Multi-Level Governance* atau tata kelola multi-level (MLG) yang dikembangkan pada awal tahun 2000-an. MLG menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan terdesentralisasi, tata kelola pembangunan harus melibatkan koordinasi antara level yaitu lokal, regional, dan nasional (Allain-Dupré, 2020; Gray, 2022). Koordinasi antar level

pemerintahan menjadi krusial untuk mengelola tanggung jawab bersama, saling ketergantungan, dan tantangan kebijakan. MLG menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola lintas daerah dalam WP hanya dapat dicapai jika terjadi interaksi fungsional dan kooperatif antara daerah dengan otoritas yang lebih tinggi (provinsi/pusat), tanpa bergantung pada struktur hierarkis.

Harapan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pengelolaan WP Kedungsepur sangat besar. Provinsi diposisikan sebagai fasilitator utama pembentukan kelembagaan WP, sekaligus koordinator lintas sektor dan lintas kabupaten/kota. Selain itu,

provinsi diharapkan menjadi penyedia pendanaan awal dan tenaga profesional, pendorong integrasi program pembangunan antar daerah, serta penguat konektivitas wilayah dan logistik regional. Fungsi provinsi juga meluas pada aspek promosi investasi, ekonomi wilayah, hingga kebijakan afirmatif untuk daerah yang lebih tertinggal di dalam WP, seperti Demak, Grobogan, Kendal, dan Salatiga. Penguatan kelembagaan WP Kedungsepur hanya dapat berjalan efektif jika pemerintah provinsi memainkan peran sentralnya, baik sebagai fasilitator, koordinator, maupun katalisator pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.



Gambar 3. Hasil Harapan Bentuk Kelembagaan
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selain itu, juga ditemukan kompleksitas dan tantangan tata kelola lintas wilayah. *Pertama*, isu tumpang tindih kewenangan masih menjadi kendala utama, di mana pemerintah daerah seringkali tidak bisa mengakses program atau intervensi cepat karena status aset berada pada level pemerintahan lain. Hal ini menimbulkan kesenjangan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah. Implikasinya, diperlukan harmonisasi kewenangan melalui pemetaan aset lintas wilayah yang dilandasi dokumen legal (MoU, Pergub, atau Perbup) serta penguatan mekanisme koordinatif antar-OPD dan antar-level pemerintahan.

Kedua, terdapat fragmentasi dalam promosi investasi, karena tiap daerah masih cenderung melakukan promosi secara terpisah, tanpa mekanisme kolektif lintas wilayah. Oleh karena itu, penting untuk membentuk unit promosi investasi regional Kedungsepur yang terintegrasi dengan

OSS dan berfungsi menyusun hingga mengawal promosi bersama. Standarisasi dokumen pelayanan investasi lintas kabupaten/kota juga dibutuhkan, diiringi dengan peran provinsi sebagai koordinator utama promosi regional.

Ketiga, persoalan rantai pasok yang terdesentralisasi menjadi tantangan serius. Kota Semarang yang berstatus metropolitan belum mampu memenuhi kebutuhan produksi pangan maupun bahan baku industri secara mandiri, sehingga ketergantungan pada daerah *hinterland* (Demak, Kendal, Grobogan, dan Salatiga) menjadi tinggi. Namun, belum ada sistem integrasi rantai pasok lintas daerah. Untuk itu, pembentukan pusat koordinasi rantai pasok Kedungsepur sangat dibutuhkan, agar distribusi komoditas strategis bisa dikelola lebih efisien, sekaligus memperluas fungsi kelembagaan WP ke sektor pangan dan industri.

Keempat, dari sisi kelembagaan, WP Kedungsepur dinilai masih lemah dan non-



struktural. Sekber yang ada hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi bergilir tanpa dukungan anggaran, kewenangan, dan kapasitas operasional. Untuk memperkuat kelembagaan, transformasi Sekber menjadi Badan Pengelola Wilayah Perkotaan yang permanen, profesional, dan berbasis regulasi formal (SK Gubernur atau Peraturan Daerah) perlu segera diwujudkan. Peran provinsi dalam fasilitasi kelembagaan formal menjadi sangat vital dalam konteks ini.

Kelima, terdapat kebutuhan mendesak akan koordinasi multilevel. Perbedaan kepentingan antara Kota Semarang sebagai inti dan daerah *hinterland* menciptakan ketidakseimbangan dalam perencanaan wilayah, distribusi investasi, serta akses terhadap proyek strategis nasional. Oleh karena itu, kerangka kerja koordinasi multi-level yang menghubungkan provinsi, kabupaten/kota, dan pusat sangat diperlukan. Sinkronisasi RTRW, RPJMD, serta penerapan mekanisme kolaborasi kelembagaan lintas administrasi menjadi kunci keberhasilan.

Keenam, tantangan infrastruktur dan lingkungan lintas batas juga menonjol, khususnya terkait pengelolaan banjir, rob, DAS, serta kawasan rawan bencana yang melewati batas administrasi. Tidak adanya sistem terpadu membuat persoalan ini sulit ditangani oleh satu daerah saja. Implikasinya, diperlukan kelembagaan lintas daerah permanen yang mampu menangani isu lingkungan bersama, dengan dukungan data spasial, regulasi RTRW, serta mekanisme pendanaan yang jelas.

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan WP Kedungsepur saat ini masih bersifat parsial dan lemah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan formal, transformasi promosi investasi, pembentukan pusat koordinasi rantai pasok, serta penguatan kerangka kerja multilevel dan infrastruktur lintas batas menjadi agenda prioritas untuk memastikan Kedungsepur berfungsi sebagai kawasan metropolitan berdaya saing tinggi.

Analisis Peran Kelembagaan

Analisis ini menekankan triangulasi data, di mana hasil kuesioner kuantitatif dibandingkan dan dipadukan dengan temuan kualitatif dari FGD, wawancara, serta telaah dokumen profil kabupaten/kota. Analisis ini merujuk pada

pendekatan *Institutional Collective Action* (ICA) atau Aksi Kolektif Institusional yang dapat mempengaruhi tata kelola pada berbagai tingkatan pemerintahan. ICA membantu menjelaskan hambatan dan potensi kerja sama antar pemerintah daerah (Feiock, 2023; Kim et al., 2022). Teori ICA menyatakan bahwa kolaborasi lintas yurisdiksi memerlukan tujuan kepentingan, serta insentif yang jelas, didukung kepercayaan antar aktor, dan regulasi yang memungkinkan pembagian peran dan tanggung jawab. Hasil analisis konvergensi dapat dirangkum dalam empat tema utama berikut.

Tema 1: Partisipasi & Keterlibatan Daerah

1. Hasil

Defisit terjadi pada arus masuk institusional (mandat resmi, personel, dan anggaran) yang membuat partisipasi terjebak pada level simbolik. Ketika isu WP tidak diarusutamakan dalam dokumen perencanaan, kolaborasi sulit berlanjut melewati fase forum/rapat. Terdapat Konvergensi: Kedua data menunjukkan bahwa partisipasi daerah bersifat simbolik, belum terinstitusionalisasi dalam mekanisme formal.

2. Implikasi & tindak lanjut.

Tetapkan kuota personel dan kode rekening kerjasama WP di tiap daerah; mewajibkan *tagging* program lintas wilayah dalam RKPDP/Renja OPD; susun SOP pelibatan lintas daerah dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Tema 2: Koordinasi Lintas Daerah

1. Hasil

Ada “jembatan putus” antara komunikasi operasional (yang relatif berjalan) dengan koordinasi formal (mekanisme, keputusan bersama, dan pembiayaan). Tanpa sekretariat bersama/SOP lintas OPD, koordinasi mudah berhenti di level informasi. Konvergensi: Terdapat konsistensi kuat bahwa koordinasi berjalan informal dan personal, bukan struktural, meski persepsinya cukup positif.

2. Implikasi & tindak lanjut.

Bentuk forum koordinasi tematik (transportasi, pangan, SDA) dengan sekretariat permanen; terapkan SOP bersama (baseline data, jadwal rakor, *issue log*); bangun dashboard koordinasi proyek lintas batas agar progress, kendala, dan keputusan terdokumentasi.

Tema 3: Dukungan Institusional & Kelembagaan

1. Hasil.

Akar masalah WP adalah defisit kelembagaan: tidak ada entitas yang memegang mandat koordinasi, otoritas penganggaran, dan fungsi eksekusi lintas OPD. Selama celah ini bertahan, inisiatif kolaborasi akan sporadis dan tidak berkelanjutan. Data kualitatif dan kuantitatif sepakat bahwa defisit kelembagaan WP adalah akar masalah utama yang menghambat kolaborasi pembangunan.

2. Implikasi & tindak lanjut.

Menaikkan level dari sekber ke Badan Pengelola WP (SK Gubernur/PerGub) dengan: sekretariat tetap, *organigram* jelas, *funding window* lintas daerah (co-funding/KPBU), dan *playbook* kebijakan (SOP lintas OPD, tata kelola data bersama).

Tema 4: Dampak & Manfaat Pembangunan WP

1. Hasil.

Ada kesenjangan distribusi manfaat dan *attribution gap*—hasil positif dinisbatkan ke program sektoral, bukan kelembagaan WP, karena lembaga belum hadir sebagai *orchestrator*. Meski data kuantitatif menunjukkan persepsi positif atas manfaat WP, data kualitatif justru memperlihatkan ketimpangan dan eksklusivitas manfaat yang perlu ditangani melalui reformulasi kelembagaan.

2. Implikasi & tindak lanjut.

Rancang pipeline program WP (cluster agrolistik, manufaktur, pariwisata), tetapkan mekanisme berbagi manfaat (co-marketing, *revenue sharing* terbatas, *workforce pooling*), dan *deal room* investasi bersama agar promosi dan dampaknya tersebar ke semua anggota WP.

Tabel 2. Tema Pengelolaan Wilayah

Tema	Implikasi Strategis
Partisipasi Daerah	Perlu desain kelembagaan yang membuka ruang aktor lokal setara
Koordinasi Lintas Wilayah	Lembaga WP harus menyediakan forum koordinasi fungsional
Dukungan Kelembagaan	Diperlukan kelembagaan baru dengan legitimasi dari Gubernur
Manfaat WP	Butuh keadilan spasial/ keseimbangan dan pembagian manfaat WP

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel di atas menyajikan hasil sintesis terhadap empat tema utama dalam pengelolaan Wilayah Prioritas (WP) Kedungsepur, yaitu:

1. Partisipasi Daerah

Ditemukan pentingnya partisipasi daerah. Implikasi strategisnya adalah perlunya desain kelembagaan yang membuka ruang partisipasi bagi aktor lokal secara setara.

2. Koordinasi Lintas Wilayah

Koordinasi antarwilayah sudah berjalan, namun memerlukan penguatan. Oleh karena itu, diperlukan lembaga WP yang mampu menyediakan forum koordinasi yang bersifat fungsional.

3. Dukungan Kelembagaan

Terdapat kebutuhan akan kelembagaan baru yang mendapatkan legitimasi dari Gubernur untuk mendukung efektivitas pengelolaan WP.

4. Manfaat WP

Muncul kebutuhan strategis untuk menjamin keadilan spasial, keseimbangan, dan pembagian manfaat WP secara merata.

Analisis menunjukkan beberapa poin penting terkait kelembagaan, yaitu:

- Permasalahan utama WP Kedungsepur adalah kelembagaan.
- Koordinasi lintas wilayah memang sudah ada, namun masih terbatas dalam sistem yang kurang kuat.
- Desain kelembagaan WP perlu diarahkan agar fleksibel, inklusif, dan berjenjang (multilevel).
- Kelembagaan harus mampu menyelesaikan permasalahan strategis WP.
- Temuan kuantitatif dan kualitatif saling menguatkan, menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan WP sangat dibutuhkan.

Analisis Opsi Kelembagaan WP Kedungsepur

Sebagai tindak lanjut dari identifikasi permasalahan kelembagaan, telah dirumuskan lima opsi kelembagaan sebagai alternatif solusi. Setiap opsi dirancang dengan mempertimbangkan bentuk organisasi, mandat, kelebihan, kekurangan, serta relevansinya terhadap konteks lokal dan kapasitas daerah. Opsi-opsi ini dapat berdiri sendiri maupun



dikombinasikan dalam bentuk model transisi bertahap menuju kelembagaan yang lebih mapan. Berikut adalah uraian detail dari masing-masing opsi kelembagaan:

1) Opsi 1: Penguatan Forum/Sekretariat

- Bentuk: Revitalisasi Sekretariat Bersama yang bersifat non-struktural. Forum ini berperan dalam mengatur koordinasi ringan melalui agenda-agenda tertentu seperti rapat rutin dan kegiatan bersama antar wilayah.
- Mandat: Koordinasi informasi, data, sinkronisasi program, promosi daerah, serta pemanfaatan program dan pendanaan yang sudah ada.
- Kelebihan: Biaya rendah, cepat diimplementasikan, dan memanfaatkan jaringan atau mekanisme yang sudah berjalan.
- Kekurangan: Kapasitas eksekusi yang terbatas, rentan terhadap perubahan komitmen, serta sulit dijadikan landasan kerja lintas daerah yang kuat.
- Relevansi: Cocok sebagai Phase 0 untuk membangun fondasi awal struktur kelembagaan dan pemetaan aktor serta peran.
- Catatan: Dapat dipakai sebagai titik awal untuk membangun kesepahaman dan pendekatan metode awal seperti analisis kelembagaan dan matriks aktor.

2) Opsi 2: Badan Pelaksana Koordinasi/ Sekretariat (Pergub)

- Bentuk: Sekretariat Teknis yang ditempatkan di bawah struktur resmi seperti DPMPTSP/Bappeda dan dilegitimasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
- Mandat: Fasilitasi koordinasi lintas sektor dan wilayah, mendukung pengelolaan teknis dan operasional WP secara formal.
- Kebutuhan Teknis: Memiliki kapasitas, anggaran, dan legalitas yang jelas untuk mengelola lintas kewenangan dan lintas wilayah secara konsisten.
- Kelebihan: Struktur lebih jelas dan permanen; memiliki kekuatan legal dan kemampuan mengelola program prioritas.
- Kekurangan: Perlu proses regulasi (Pergub), butuh waktu untuk pembentukan.

- Catatan: Sangat relevan untuk penguatan perencanaan lintas wilayah dan sebagai langkah lanjut dari forum informal.

3) Opsi 3: Unit Pelaksana Teknis (Semi Otonomi)/UPT/BLUD/dll

- Bentuk: Unit pelaksana teknis khusus berbentuk organisasi profesional seperti BLUD atau lembaga sejenis. Bisa didirikan oleh daerah atau dalam kerangka kolaborasi antarwilayah.
- Mandat: Menangani pengelolaan teknis WP seperti pengelolaan SDA, infrastruktur, ekonomi, dan indikator WP secara operasional.
- Kelebihan: Kapasitas pelaksanaan tinggi, fleksibel dalam penggunaan anggaran, dan berorientasi hasil.
- Kekurangan: Butuh proses regulasi dan pembentukan formal; bisa lebih rumit secara administratif.
- Catatan: Cocok untuk tahap implementasi lanjutan, khususnya jika sudah ada kejelasan proyek-proyek strategis lintas wilayah dan kebutuhan pendanaan bersama.

4) Opsi 4: Kerjasama Klaster Tematik & Data Hub

- Bentuk: Kerjasama antardaerah dalam bentuk jaringan klaster tematik (misalnya: pangan, transportasi, investasi, pariwisata), yang dikoordinasikan melalui sekretariat kecil dengan fokus pada *problem-driven collaboration*.
- Mandat: Fokus pada kerjasama berbasis MoU sektoral, pelaksanaan proyek tematik, dan berbagi data atau informasi antarwilayah.
- Kelebihan: Fleksibel, tidak memerlukan struktur formal berat, dan bisa mendorong inisiatif cepat untuk isu tertentu.
- Kekurangan: Keterbatasan daya koordinasi jangka panjang, rentan kehilangan konsistensi tanpa struktur formal.
- Catatan: Cocok untuk wilayah dengan kapasitas koordinasi tematik yang kuat dan tingkat kepercayaan antar wilayah tinggi.

5) Opsi 5: Model Gabungan (Hybrid & Transisi Dinamis)

- Tahap 1: Menggabungkan Opsi 1 dan 4, dimulai dengan forum dan kerja sama klaster

tematik di sektor prioritas (transportasi, pangan, investasi).

- Tahap 2: Mengembangkan sekretariat koordinasi (mengadopsi Opsi 2) dengan sumber daya dan pendanaan bersama antarwilayah.
- Tahap 3: Konsolidasi menjadi Unit Semi-Otonom (Opsi 3) dengan penguatan aspek hukum, keuangan, dan tata kelola.
- Kelebihan: Dinamis dan adaptif terhadap perubahan konteks dan kesiapan daerah, serta memungkinkan reformasi bertahap hingga kelembagaan jangka panjang yang kuat.
- Catatan: Pendekatan ini sangat relevan untuk jangka menengah-panjang (hingga 2030) dan memberikan ruang fleksibilitas dalam implementasi kebijakan lintas wilayah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan berikut rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan para pemangku kepentingan terkait. Langkah strategis pengembangan kelembagaan diarahkan untuk:

- 1) Memperkuat koordinasi lintas daerah melalui wadah kolaboratif formal
- 2) Menyusun agenda bersama berbasis isu strategis kawasan seperti investasi, transportasi, dan lingkungan
- 3) Memastikan adanya fasilitasi aktif dari pemerintah provinsi dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah.

Kelembagaan WP Kedungsepur diharapkan mampu berkembang sebagai instrumen koordinatif yang efektif, berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator pembangunan, serta menjadi motor penggerak integrasi wilayah menuju kawasan metropolitan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Langkah strategis pembentukan kelembagaan WP Kedungsepur dirancang secara berkelanjutan yang terdiri dari langkah strategis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, agar sejalan dengan kesiapan institusional dan kebutuhan kolaborasi lintas daerah:

- 1) Jangka Pendek (2026–2027): Penguatan Forum melalui Sekretariat Bersama (Sekber)**
Pada tahap awal, strategi difokuskan pada penguatan kelembagaan yang telah ada, yaitu

Forum WP Kedungsepur melalui optimalisasi Sekretariat Bersama (Sekber). Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi rutin antar kabupaten/kota di kawasan Kedungsepur dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai *gatekeeper* dan fasilitator utama. Langkah konkret pada tahap ini meliputi:

- Pelaksanaan rapat koordinasi reguler antar daerah untuk menyepakati agenda kerja bersama.
- Penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kabupaten/kota anggota WP Kedungsepur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Penetapan Bappeda Provinsi sebagai *leading sector* kerja sama antarwilayah.
- Penyusunan landasan kelembagaan yang menjadi dasar penguatan koordinasi lintas sektor ke depan.

Tahap ini juga menjadi fase awal untuk merumuskan fokus isu strategis kawasan serta perencanaan program *quick win* yang akan dilakukan pada tahap kelembagaan berikutnya.

- 2) Jangka Menengah (2028–2030): Pembentukan Satuan Pelayanan Wilayah Pengembangan (SPWP)**

Pada tahap ini, kelembagaan hasil penguatan forum dievaluasi dan dikembangkan menjadi Sekretariat Koordinasi Resmi yang dinamakan Satuan Pelayanan Wilayah Pengembangan (SPWP). Pembentukan SPWP ditujukan untuk memperkuat fungsi koordinatif lintas sektor, memperluas jejaring kerja sama, serta memastikan integrasi antara program pembangunan lintas daerah dengan RPJMD Provinsi dan agenda strategis nasional. Hasil utama dari tahap ini adalah:

- Terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah sebagai dasar hukum operasional SPWP.
- Pelaksanaan proyek-proyek *quick win* yang dirancang berdasarkan tema strategis kawasan, seperti peningkatan investasi berbasis rantai pasok dan integrasi transportasi regional.
- Penerapan mekanisme koordinasi dan perencanaan terpadu antar-OPD serta antar



kabupaten/kota untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bersama.

Tahap ini berfungsi sebagai masa konsolidasi kelembagaan, di mana mekanisme kerja, struktur organisasi, dan pembiayaan mulai distandarkan secara formal.

3) Jangka Panjang (>2030): Penguatan Operasional dan Replikasi Kelembagaan

Pada tahap jangka panjang, kelembagaan WP Kedungsepur diarahkan untuk berkembang secara mandiri melalui penguatan operasional SPWP dan perluasan mandat kelembagaan. Fokus utamanya adalah memperluas tema pengembangan yang dikelola (seperti inovasi ekonomi kawasan, lingkungan, dan layanan publik lintas daerah) serta mereplikasi model kelembagaan SPWP di wilayah pengembangan lain di Jawa Tengah. Tujuan akhir dari tahap ini adalah menciptakan model kelembagaan lintas wilayah yang adaptif, berkelanjutan, dan dapat dijadikan contoh dalam tata kelola kawasan metropolitan di Indonesia.

REFERENSI

- Allain-Dupré, D. (2020). The multi-level governance imperative. *British Journal of Politics and International Relations*, 22(4), 800–808. <https://doi.org/10.1177/1369148120937984>
- Feiock, R. C. (2023). Regional governance and institutional collective action. In F. Teles (Ed.), *Handbook on local and regional governance* (pp. 362–374). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.1111/puar.12799>
- Gray, C. (2022). The role of multi-level governance in shaping regional growth and competitiveness in the Basque Country. *Political Quarterly*, 93(4), 628–636. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13186>
- Kim, S. Y., Swann, W. L., Weible, C. M., Bolognesi, T., Krause, R. M., Park, A. Y. S., et al. (2022). Updating the institutional collective action framework. *Policy Studies Journal*, 50(1), 9–34. <https://doi.org/10.1111/psj.12392>
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2025 Tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029
- Teles, F. (Ed.). (2023). *Handbook on local and regional governance*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800371200>